



## The World's Maritime Axis, a Critical Analysis

Suspada Siswoputro<sup>1\*</sup>, Anak Agung Banju Perwita<sup>2</sup>, Budi Suseto<sup>3</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>4</sup>

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

**Corresponding Author:** Suspada Siswoputro [suspada.sp@gmail.com](mailto:suspada.sp@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Diplomacy, Global, Jokowi, Maritime, Axis

*Received :* 4, December

*Revised :* 10, January

*Accepted:* 15, March

©2024 Siswoputro, Perwita, Suseto, Prakoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The dynamics of threats and challenges facing Indonesia in the Southeast Asia and Pacific region continue to develop. Among them is the rivalry between two great powers competing for hegemony over the Asia Pacific accompanied by local and regional threats carried out by non-state actors. This research is an analysis aimed at explaining the basic concept of a strategy introduced by President Jokowi, namely the World Maritime Axis, then testing the extent to which this concept is able to overcome existing threats and challenges, so whether this strategy is worthy of being maintained or not. The research was carried out through literature studies until February 2024. The results show that the World Maritime Axis strategy is worth continuing, and even needs to be supported by the DPR to strengthen its legality in the form of a law.

---

## Poros Maritim Dunia, Sebuah Analisa Kritis

Suspada Siswoputro<sup>1\*</sup>, Anak Agung Banju Perwita<sup>2</sup>, Budi Suseto<sup>3</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>4</sup>

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

**Corresponding Author:** Suspada Siswoputro, email: [suspada.sp@gmail.com](mailto:suspada.sp@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Diplomasi, Global, Jokowi, Maritim, Poros

*Received :* 4, December

*Revised :* 10, January

*Accepted:* 15, March

©2024 Siswoputro, Perwita, Suseto, Prakoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Dinamika ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik terus berkembang. Diantaranya adalah Rivalitas antara dua kekuatan besar yang bersaing memperebutkan hegemoni atas Asia Pasifik disertai ancaman lokal dan regional yang dilakukan oleh aktor non-negara. Penelitian ini merupakan sebuah analisa yang ditujukan untuk menjelaskan konsep dasar sebuah strategi yang diperkenalkan oleh Presiden Jokowi, yaitu Poros Maritim Dunia, kemudian menguji sejauh mana konsep ini mampu mengatasi ancaman dan tantangan yang ada, sehingga apakah strategi ini layak atau tidak untuk dipertahankan. Penelitian dilakukan melalui studi literatur sampai dengan bulan Februari 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi Poros Maritim Dunia layak dilanjutkan, bahkan perlu didukung oleh DPR untuk memperkuat legalitasnya dalam bentuk sebuah Undang-Undang.

---

## PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo memperkenalkan Poros Maritim Dunia atau Global Maritime Fulcrum (GMF) sebagai visi strategis untuk memanfaatkan potensi maritim Indonesia yang sangat besar untuk pembangunan nasional jangka panjang. Konsep ini diungkapkan sesaat setelah dilantik menjadi Presiden pada tahun 2014. Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi merupakan pendekatan komprehensif dalam memanfaatkan potensi maritim Indonesia untuk pembangunan nasional. Dengan mengintegrasikan beberapa pertimbangan dari sisi ekonomi, geopolitik, geostrategi dan keamanan. Poros Maritim Dunia bertujuan untuk mendorong Indonesia menjadi pemain maritim terkemuka di kancah global.

Poros Maritim Dunia merupakan visi Indonesia untuk menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, tangguh, dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap keamanan dan perdamaian regional dan dunia dengan tidak mengesampingkan kepentingan nasional (Diposaptono, 2017). Pengertian Poros Maritim Dunia tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Maritim Indonesia dan Perpres 34/2022, Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa arah pembangunan Indonesia melalui Poros Maritim Dunia.

Pertanyaan mendasar dalam tulisan ini adalah apakah visi Poros Maritim Dunia masih relevan untuk diterapkan sebagai visi nasional bangsa Indonesia di masa depan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2022. Bahwa Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 sebagai bagian dari Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan yang berkelanjutan melalui penerapan di berbagai wilayah Indonesia, perlu dilanjutkan secara terpadu dan program dan kegiatan kelautan telah sesuai dengan target pembangunan nasional di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2022-2025 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tentang RENAKSI KKI, 2022).

Menurut teori klasik dengan gambaran vertikal yang tampak sederhana, yaitu teori *Kontinum Politik - Political Continuum*, Clausewitz. Dimana Kebijakan diterjemahkan dalam bentuk Strategi, lantas diaplikasikan dalam bentuk Taktik. Kami mencoba menyiapkan tahapan yang setara dengan Pergeseran Copernicus (*Copernican Shift*) dalam paradigma strategi yaitu *tujuan-cara-sarana*. Kini paradigma ini menjadi lebih kompleks, karena beroperasi pada tataran strategi dan kebijakan dengan totalitas tujuan, di mana cara dan sarana di tingkat bawah yang saling berhubungan dengan implementasi politik di tataran kebijakan dari unsur-unsur strategis yang sama. Keterkaitan ini merupakan inti dari gambaran dari Clausewitz tentang sebuah perang sebagai kelanjutan kebijakan politik dengan cara yang berbeda (Jablonsky et al., 2008). Hal ini tidak hanya berlaku dalam perang secara harafiah saja, namun lebih luas lagi yaitu sebagai taktik dan strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan. Kebijakan pemerintah

(Presiden dan DPR), dalam hal ini berupa dukungan kepada Strategi yang lahir terlebih dulu, sebagai penegasan dalam bentuk perundang-undangan diperlukan sebagai arah pembangunan nasional.

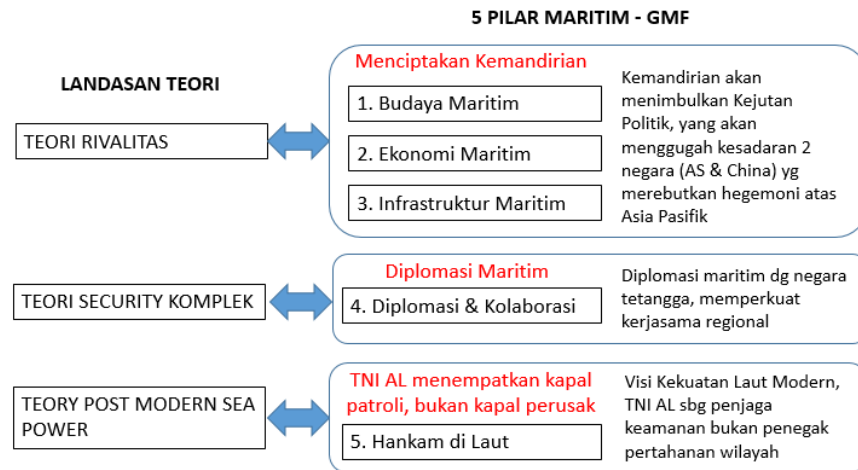
Situasi saat ini, Indonesia seolah terjebak dalam rivalitas dua kekuatan besar yang saling bersaing berebut hegemoni atas Asia Pasifik. Menurut Diehl (2010) yang menekankan bahwa kejutan politik (*political shock*) diperlukan untuk menciptakan atau mengakhiri sebuah persaingan atau pertikaian, meskipun hal tersebut merupakan kondisi semi-perlu. Sebab jarang ditemukan suatu konflik bisa terjadi atau berakhir tanpa adanya kejutan politik, seringkali kejutan politik yang terjadi bisa mengawali atau menjadi sebuah akhir dari suatu konflik. Dan diperlukan pemahaman dalam mengenali jenis-jenis hubungan yang memungkinkan terjadinya konflik. Konflik antara AS dan China tidak terjadi secara tiba-tiba, begitu juga setiap konflik yang terjadi antara dua negara. Hampir semua konflik selalu muncul ketika kedua negara pernah mengalami hubungan yang pasang surut dan konflik yang serius dengan penggunaan instrumen militer dalam kebijakan luar negerinya (Diehl & Goertz, 2010).

Sedangkan menurut Buzan (1998), mengidentifikasi permasalahan keamanan merupakan hal yang mudah bagi penganut tradisi pada umumnya, yang menyamakan permasalahan keamanan dengan permasalahan militer atau penggunaan kekuatan bersenjata. Namun saat ini, identifikasi masalah keamanan lebih sulit jika hanya mengacu pada sektor militer saja. Ada bahaya intelektual dan bahaya politik jika kita hanya memasukkan isu militer ke dalam cakupan isu keamanan yang lebih luas. Konsep *Komplek Keamanan* atau *Security Complex* yang diperkenalkan Buzan didefinisikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kesamaan persepsi dan perhatian utamanya terhadap keamanan yang saling terkait, sehingga masalah keamanan nasional setiap negara tidak dapat dianalisis atau diselesaikan secara terpisah satu sama lain (Buzan et al., 1998).

Menyangkut persoalan di laut, Geoffrey Till (2004), dalam bukunya *Kekuatan Laut: Sebuah Pedoman untuk Abad Kedua Puluh Satu*, menyatakan bahwa maritim terkadang diartikan hanya dalam kaitannya dengan angkatan laut, terkadang juga diartikan angkatan laut dalam kaitannya dengan kekuatan darat dan udara, terkadang juga diartikan sebagai angkatan laut dalam konteks yang lebih luas, yaitu berkaitan dengan segala kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan laut secara komersial dan non-militer. Bahkan terkadang istilah maritim diartikan mencakup ketiga aspek di atas. Istilah *sea power*, lagi-lagi menurut Geoffrey, dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek input dan output. Dari aspek input, kekuatan laut adalah angkatan laut, penjaga pantai, industri maritim non-militer secara luas dan sepanjang relevan, juga mencakup kekuatan darat dan laut. Sedangkan outputnya adalah rasa keamanan, manfaat, dan nilai ekonomis yang dihasilkan oleh pengelolaan laut. Kemudian Geoffrey mengatakan bahwa kekuatan laut post-modern tidak hanya tentang apa yang diperlukan untuk dapat menguasai dan memanfaatkan laut, tetapi juga kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain atau apa yang dilakukan masyarakat di laut atau dari laut. Pemahaman ini mendefinisikan

kekuatan laut dalam artian hasil, sebagai keluaran atau output, bukan sebagai faktor atau masukan yang diperlukan, atau lebih jelasnya, bahwa laut adalah suatu tujuan dan bukan merupakan sarana (Till 2004).

Berikut ini kerangka pemikiran bahwa strategi Poros Maritim Dunia mampu menjawab Ancaman dan Tantangan terkini.



Gambar 1. Konsep 5 Pilar Poros Maritim

## METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dari sumber-sumber skunder yang bisa dipercaya, diantaranya Peraturan Presiden, laporan resmi lembaga pemerintah, jurnal akademis, dan berita internet terpercaya yang hadir sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2024. Analisa dilakukan menggunakan metode triangulasi untuk memastikan keterkaitan antara beberapa data menjadi sebuah rangkaian pemahaman yang saling berhubungan.

## HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Poros Maritim Dunia ternyata mampu menjawab ancaman dan tantangan yang ada saat ini dan layak untuk dilanjutkan. Dan untuk memperkuat posisinya diperlukan dukungan dari DPR sehingga konsep ini yang semula hanya berbentuk Perpres dan Keppres bisa menjadi sebuah Undang-undang yang disahkan oleh Presiden bersama dengan DPR.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep dasar Poros Maritim Dunia

Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan terletak di antara daratan benua Asia dan Oceania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, sekaligus berada di antara benua Asia dan Oceania. Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudera Pasifik di sebelah utara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste, Samudera Hindia, Laut Timor, dan Laut Arafuru. Di sebelah barat berbatasan

dengan Samudera Hindia. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudera Pasifik.

Indonesia merupakan negara terluas ke-14 dan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 1.904.569 km<sup>2</sup>, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah total 17.504 pulau (Baumann, 2021). Nama alternatif yang digunakan untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara (van der Kroef, 1951). Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 278.696.200 jiwa pada tahun 2023 (Biro Pusat Statistik, 2024). Sedangkan menurut Pusat Hidro Oceanografi Angkatan Laut, hasil perhitungan disepakati bahwa Wilayah Kedaulatan yang terdiri atas perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.110.000 km<sup>2</sup>, dan laut teritorial seluas 290.000 km<sup>2</sup>. Wilayah kedaulatannya terdiri atas Zona Tambahan seluas 270.000 km<sup>2</sup>, Zona Ekonomi Eksklusif seluas 3.000.000 km<sup>2</sup>, Landas Kontinen seluas 2.800.000 km<sup>2</sup>. Luas perairan Indonesia 6.400.000 km<sup>2</sup>, luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (darat dan perairan) 8.300.000 km<sup>2</sup>. Garis pantai Indonesia memiliki panjang 108.000 km (Pushidrosal, 2018).

Beberapa keunggulan yang diperoleh berdasarkan letak geografis Indonesia antara lain sebagai berikut: Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Indonesia merupakan titik persimpangan kegiatan perekonomian dunia, antara perdagangan antara negara industri dan negara berkembang. Misalnya saja perdagangan antara Jepang, Korea, dan China dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai budaya dan peradaban dunia. Indonesia menerima sinar matahari secara merata sepanjang tahun karena letaknya yang berada di garis khatulistiwa, serta hanya terdapat dua musim yaitu kemarau dan hujan. Pengaruh musim menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris unggulan. Pertanian di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dan menghasilkan banyak sekali bahan pangan seperti padi, jagung, sayur mayur, buah-buahan, karet, kopi, gula, tembakau, dll yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan dan keberlangsungan penduduk Indonesia, secara ekonomi juga demikian, kesempatan untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional.

Dalam konteks maritim, Indonesia mempunyai kekayaan yang luar biasa mengingat wilayah perairannya yang sangat luas. Seperti dikatakan oleh Zuzy Anna (2020), Indonesia mempunyai potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 memperkirakan potensi tersebut bisa mencapai US\$ 1338 miliar atau Rp. 19,6 triliun per tahun (Kantor Komunikasi Publik, 2020).

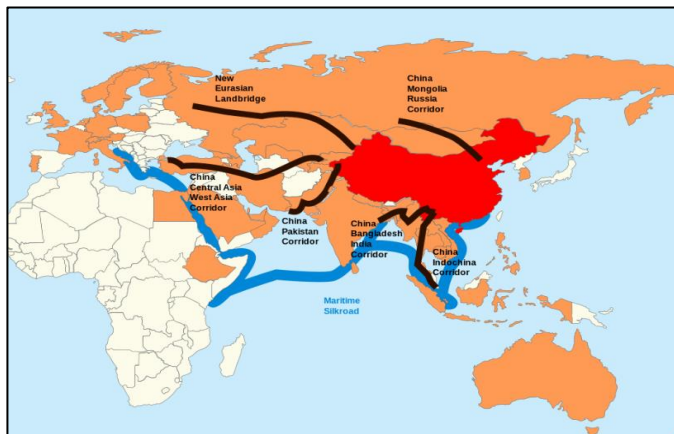
Kekayaan laut ini berasal dari beberapa sumber, antara lain sumber daya ikan, keanekaragaman hayati yang kaya sebagai bahan baku obat-obatan, kosmetik, dan pangan. Kekayaan lainnya adalah laut menyimpan sejumlah energi terbarukan dan tak terbarukan. Sumber energi terbarukan antara lain air laut panas, gelombang laut, dan arus laut. Sedangkan energi tak terbarukan seperti minyak bumi dan gas alam. Potensi selanjutnya adalah wisata bahari yang melibatkan ilmu interdisipliner. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah

kekayaan arkeologi yang berasal dari bangkai kapal seperti koin emas dan barang antik.

Upaya pemerintah dalam mengelola potensi kelautan yang luar biasa itu kemudian disusun menjadi konsep dasar Poros Maritim Dunia. Beberapa aspek penting yang merupakan esensi dari Poros Maritim Dunia yang dikenal sebagai 5 pilar poros maritim yang disampaikan pada momentum East Asian Summit 2014 (Akhirman, 2020), yaitu: *Identitas Bangsa Maritim, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur, Diplomasi dan Kolaborasi Regional, serta Pertahanan dan Keamanan.*

## 2. Kemampuan visi Poros Maritim Dunia menjawab ancaman dan tantangan

Di balik segala potensi kekayaan alam yang ada, Indonesia seolah menjadi semacam hidangan besar yang disajikan tanpa perlindungan yang memadai. Sehingga beberapa negara ekonomi kuat memandang Indonesia tidak hanya dari



Gambar 2: Peta Belt Road Initiative (BRI)

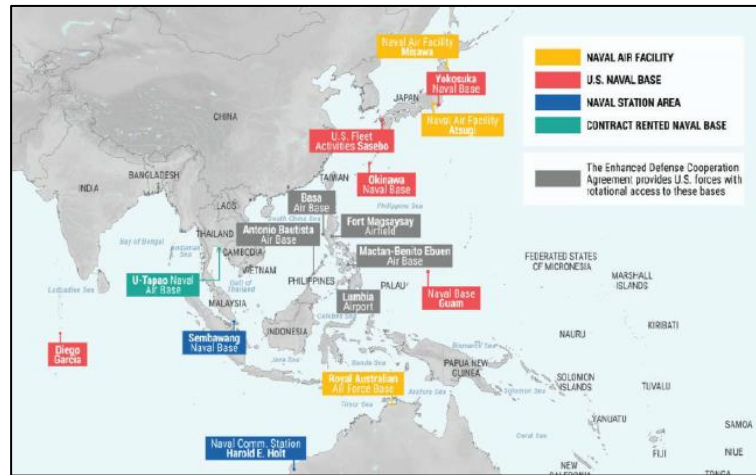
segi potensi, namun sebagai ancaman karena usaha mereka untuk bisa menguasai. Sehingga kehadiran dan aktifitas mereka menjadi sebuah ancaman terhadap kedaulatan. Ini bisa dilihat dari rivalitas dua kekuatan besar yaitu Amerika dan China di Asia Pasifik, walaupun kedua negara ini tidak menunjukkan nya secara terbuka namun rivalitas

tersebut nyata adanya.

Belt Road Initiative (BRI) adalah strategi pembangunan global yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok yang melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika. BRI diumumkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping, pada bulan September 2013 di Universitas Nazarbayev, Kazakhstan. BRI merupakan kegiatan ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang beragam yang sebelumnya disebut "Jalur Sutra Baru" dan kemudian diubah menjadi "One Belt One Road". Dan berkembang menjadi Belt Road Initiative (BRI) yang mempunyai dua rincian, yaitu jalur sutra ekonomi darat dan jalur sutra maritim berbasis laut. BRI menghubungkan Asia, Afrika, Oceania, dan Eropa dengan berbagai infrastruktur yang dibangun dengan pembiayaan dari pemerintah China. Dibalik itu kita harus waspada terhadap tujuan utama China yang tidak ditunjukkan secara nyata, yaitu hegemony secara politik dan ekonomi terhadap negara-negara yang dilintasi BRI.

Selain itu, salah satu ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan Indonesia adalah munculnya agresivitas China di Laut Cina Selatan di Laut Natuna bagian utara. China dengan tegas berusaha melakukan klaim atas wilayah ini secara sepihak, yang tentunya bertentangan dengan hukum internasional dan kedaulatan wilayah Indonesia.

Di sisi lain, sejak lebih dari satu dasawarsa lalu, Amerika Serikat telah membangun beberapa pangkalan militer di kawasan Indo Pasifik. Seperti dikutip dari pernyataan Presiden Barack Obama (2011), dalam keterangan resminya, Presiden AS tersebut mengumumkan pengerahan 2.500



Gambar 3: Pangkalan Militer AS di Indo-Pacific

personel marinir AS di pangkalan militer Australia di Darwin. Pasukan marinir AS ini diharapkan dapat bertindak cepat dalam mengatasi krisis kemanusiaan, bencana alam, dan gangguan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Sehingga AS dapat meningkatkan kesiapsiagaan untuk melakukan operasi tanggap darurat di kawasan ini. Meskipun tidak disebutkan secara jelas tujuan pembangunan pangkalan militer tersebut, namun Indonesia harus tetap waspada karena apapun bisa saja terjadi (Nainggolan, 2013).

Sementara itu di dalam negeri dan kawasan regional Asia Tenggara, Indonesia dan negara di Asia Tenggara juga menghadapi ancaman lokal yang bersifat tradisional maupun non-tradisional yang dilakukan oleh aktor Non-Negara di laut, berupa ancaman terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perdagangan manusia, pembajakan, imigran gelap, narkoba, terorisme, dan kejahatan transnasional lainnya.

Sejauh ini Indonesia mempunyai beberapa garda sebagai kekuatan maritim untuk merespons dan menanggulangi itu semua. Diantaranya TNI Angkatan Laut (TNI AL) sebagai penjaga kedaulatan wilayah laut, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang bertugas menjaga keamanan laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Republik Indonesia.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa konsep dasar Poros Maritim Dunia memiliki 5 pilar, selanjutnya kita uraikan satu per satu.

### 1. *Identitas Bangsa Maritim:*

Visi Poros Maritim Dunia bertujuan untuk menghidupkan kembali jati diri sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, dengan mengedepankan sifat bangsa kepulauan. Kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah penguasa lautan atau negara maritim. Setidaknya ada enam kerajaan di masa lalu yang bercorak negara maritim, antara lain *Kutai Kartanegara, Tarumanegara, Sriwijaya, Singasari, Mataram Kuno, dan Majapahit*. Kerajaan-kerajaan ini menggantungkan perekonomiannya pada sektor

maritim, karena letak geografisnya yang umumnya berada di pesisir pantai dan terhubung dengan sungai besar. Perekonomian dalam hal ini berupa perdagangan komoditas pertanian dan emas ke luar negeri seperti Tiongkok, India, Myanmar, Kamboja, Filipina, Persia, dan Arab. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda dari negara asalnya seperti keramik dari Tiongkok dan patung dewa Hindu dari India.

Melalui visi Poros Maritim Dunia, Presiden Jokowi bermaksud mengembalikan ingatan bahwa Indonesia adalah negara maritim, di mana cakupan pembangunan maritim dan kelautan yang luas mencakup aspek non fisik dan fisik. Aspek non fisik meliputi yang berkaitan dengan pengembangan budaya maritim dan tata kelola kelautan. Sedangkan pembangunan fisik mencakup aspek ekonomi kelautan, lingkungan laut, dan keamanan laut. Kedua aspek tersebut perlu dikembangkan secara bersama-sama agar esensi pembangunan maritim dapat diwujudkan secara holistik dalam visi tersebut.

## 2. *Pembangunan Ekonomi:*

Visi Poros Maritim Dunia sangat menekankan pemanfaatan sumber daya maritim untuk pembangunan ekonomi. Hal ini mencakup perikanan, wisata bahari, dan eksploitasi sumber daya kelautan dan sumber daya energi secara berkelanjutan. Meskipun sifat maritimnya sendiri lebih mengarah pada terlaksananya kegiatan pelayaran di wilayah Indonesia. Namun banyak kegiatan lain yang bisa dikembangkan dan mempunyai potensi besar, mulai dari kegiatan lingkungan pelabuhan (ruang) untuk parkir kapal, sektor perikanan, wisata bahari, industri pelayaran dari penanaman modal asing, industri minyak dan gas, yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Karena jika diserahkan pengelolaannya kepada pihak asing, maka masyarakat Indonesia hanya mempunyai hak pengelolaan yang terbatas, bahkan bagi hasil yang tidak sepadan dengan pembangunan lingkungan hidup masyarakat. Bisa dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan, dalam mengembangkan perekonomiannya akan selalu bertumpu pada kegiatan pelayaran.

Aspek lain dari visi Poros Maritim Dunia adalah penguatan industri maritim, baik militer maupun non-militer. Pemanfaatan sektor industri maritim merupakan salah satu wujud kemandirian bidang pertahanan yang harus dijaga atau dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk kemajuan industri dari berbagai sektor di Indonesia, sudah selayaknya pemerintah melakukan kajian bersama mengenai pentingnya kerjasama antara lembaga pendidikan, industri, pemerintah, dan juga pengguna dalam mengembangkan inovasi. Selain itu, kesiapan teknologi yang digunakan juga bergantung pada pengembangan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada.

## 3. *Pembangunan Infrastruktur:*

Visi Poros Maritim Dunia mencakup investasi besar pada infrastruktur maritim, seperti pelabuhan, jalur pelayaran, dan fasilitas pesisir, untuk meningkatkan konektivitas antara manusia dan jalur perdagangan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan Poros Maritim Dunia Presiden Jokowi dalam bidang infrastruktur, Indonesia telah mulai membangun Tol Laut sejak tahun

2015. Tol laut merupakan sistem transportasi antar pulau dengan menggunakan kapal besar untuk distribusi logistik. Sistem ini penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Selain membangun tol laut, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas armada penangkapan ikan Indonesia, terutama ukuran kapal di atas 10 ton (Kantor Komunikasi Publik, 2020).

Kelanjutan program tol laut terhambat oleh wabah Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2019-2022 sehingga menyebabkan seluruh rencana belum dapat terealisasi sepenuhnya.

Penguatan Identitas Maritim, Pembangunan Ekonomi Maritim dan Pembangunan Infrastruktur Maritim pada gilirannya akan menciptakan *Kemandirian Industri Maritim*. Dan kemandirian industri maritim inilah merupakan kata kunci yang efektif dalam menciptakan Kejutan Politik (*Political Shock*) dalam menghadapi *rivalitas* antara AS dan China di Asia Pasifik.

#### 4. *Diplomasi dan Kolaborasi Regional:*

Poros Maritim Dunia mendorong upaya diplomasi melalui kolaborasi maritim regional Asia Tenggara, dengan membina kemitraan dengan negara tetangga untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan maritim. Di era modern, kekuatan diplomasi pemimpin negara mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pemimpin negara dan parlemen negara lain. Karena setiap negara mempunyai tujuan masing-masing, maka dalam hal perdagangan lintas batas, produk suatu negara dapat sampai ke negara lain suatu negara harus memiliki pengawasan perbatasan yang kuat. Untuk mengantisipasi tindakan kriminal dalam aktivitas perdagangan antar negara, misalnya ancaman yang dihadapi setiap negara adalah narkoba, perdagangan manusia, pencurian ikan, penyanderaan anak buah kapal (ABK) yang sering terjadi sehingga mengharuskan setiap kepala negara dan kepala pemerintahan untuk memperkuat posisinya dalam pertemuan bilateral dan pertemuan multilateral, yang membahas ancaman yang dihadapi masing-masing negara.

Dengan kreativitasnya, manusia berusaha menjadikan hal-hal biasa menjadi unik dan memiliki nilai. Dalam hal ini, Indonesia berupaya untuk membudayakan pariwisata bahari sedemikian rupa agar dapat menjadi sesuatu yang menarik dan memiliki nilai seni dan budaya di mata dunia khususnya kawasan ASEAN. Selama ini pola pikir masyarakat yang menyebut pariwisata sama dengan pelanggaran budaya. Sedangkan kebudayaan adalah hasil karya, daya cipta, dan prakarsa masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, yang menarik perhatian orang atau kelompok lain. Perhatian dunia terhadap kebudayaan Indonesia memberikan keuntungan tersendiri karena dapat meningkatkan posisi tawar dalam hubungan internasional. Upaya Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi budaya inilah yang disebut dengan diplomasi budaya oleh Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi opini masyarakat (negara lain) guna mendukung suatu kebijakan politik luar negeri tertentu (Warsito & Kartikasari, 2007).

Melalui visi Poros Maritim Dunia, pemerintah selalu mengedepankan permasalahan maritim dengan membahasnya dalam pertemuan bilateral

maupun pertemuan internasional. Terkait dengan Penyelesaian Batas Laut, Penguatan Diplomasi Maritim, Penyelesaian Toponimi, dan Konflik Ruang Maritim. Persoalan perbatasan antar negara memerlukan waktu dan diplomasi yang kuat, seperti penyelesaian batas antara Natuna dengan RRT, Kepulauan Riau, dan lain-lain.

Diplomasi dan kolaborasi regional di kawasan Asia Tenggara merupakan implementasi dari teori *Security Complex*, di mana semua negara di kawasan Asia Tenggara memikul tanggung jawab yang sama dalam kerjasama wilayah, baik itu menyangkut masalah keamanan, pengolahan ekonomi dan stabilitas politik.

#### 5. *Pertahanan dan Keamanan:*

Visi Poros Maritim Dunia menyikapi permasalahan keamanan dengan menekankan pentingnya kemampuan lembaga keamanan (BAKAMLA) dan lembaga pertahanan laut (TNI AL) dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia yang luas. Untuk dapat menutupi spektrum risiko, ancaman dan konflik, angkatan laut post-modern terus mengembangkan kekuatan dan strategi yang dapat membuahkan prestasi. Empat tujuan aspirasi pertahanan dan keamanan Kekuatan Laut post-modern, meliputi *pengendalian laut, operasi ekspedisi, ketertiban di laut, dan pemeliharaan konsensus maritim* (Till, 2004). Jadi dalam hal ini kepentingan pengamanan bukan untuk kepentingan Indonesia sebagai pemilik laut teritorial, namun keamanan bagi semua pihak yang melintasi laut Indonesia harus mendapat jaminan keamanan kecuali musuh dari sistem yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan catatan Global Fire Power (2024), TNI Angkatan Laut menduduki peringkat ke-9 dari 145 negara dalam hal jumlah kapal patroli (Global Fire Power, 2024). Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengambil kebijakan di TNI Angkatan Laut untuk tidak mengerahkan kapal Perusak atau Fregat, karena misi TNI AL rupanya sudah sejalan Kekuatan Laut post-modern dengan misi menjaga keamanan dan ketertiban laut. Sedangkan penempatan kapal Destroyer atau Frigate lebih cenderung untuk upaya pertahanan wilayah.

Namun demikian menjadi keprihatinan bersama, sebab jika dihitung luas wilayah laut di Indonesia, jumlah kapal patroli dinilai masih kurang. Maka dari itu diperlukan dukungan dari DPR untuk bisa menerima peningkatan anggaran pembelian atau pembangunan kapal patroli dalam negeri yang dilengkapi logistik dan biaya perawatan yang memadai, sehingga akan lebih ideal dalam menjangkau seluruh wilayah laut luas di Indonesia untuk melaksanakan tugas patroli keamanan bekerja sama dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

#### 3. *Keberlanjutan visi Poros Maritim Dunia*

Kondisi geografis Indonesia sebagaimana diuraikan di atas dapat mempunyai arti banyak hal, antara lain potensi, ancaman, dan tantangan. Maka diperlukan sikap yang tepat berupa visi dan strategi yang mampu menjawab segala permasalahan yang muncul. Poin selanjutnya adalah keyakinan bahwa strategy ini harus dilanjutkan bahkan sebaiknya harus dikembangkan mengikuti

dinamika dunia terkini. Sampai sejauh ini visi Poros Maritim Dunia setidaknya mampu menjawab semua ancaman dan tantangan yang berkembang, sehingga perlu untuk dilanjutkan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Beberapa hal yang menjadi perhatian menurut teori yang dikemukakan di awal yaitu teori *rivalitas*, *security complex*, dan *kekuatan laut post-modern* dapat terjawab melalui visi Poros Maritim Dunia yang diusung Presiden Jokowi.

Dimana kemandirian industri maritim di Indonesia merupakan sebuah aksi nyata yang bisa menimbulkan kejutan politik (*political shock*) yang memunculkan kesadaran untuk berdamai antara dua kekuatan besar yang bersaing dalam merebutkan hegemoni atas kawasan Asia Pasifik. Begitu pula dengan diplomasi dan kolaborasi maritim yang diwujudkan dalam perundingan batas maritim, patroli keamanan bersama merupakan salah satu bentuk aplikasi dari teori *security complex* atau kompleks keamanan di dunia nyata. Dan upaya Indonesia untuk tidak mengerahkan kapal perusak ataupun fregat melainkan lebih banyak mengerahkan kapal patroli merupakan kebijakan yang mendukung paradigma *kekuatan laut post-modern*.

Namun hingga saat ini visi Poros Maritim Dunia masih berupa Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Sehingga tidak menutup kemungkinan visi tersebut akan dibatalkan atau diganti oleh rezim selanjutnya setelah pemilu 2024. Harapannya, visi Poros Maritim Dunia Presiden Jokowi dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Presiden pengganti. Karenanya visi Poros Maritim Dunia perlu untuk mendapat dukungan penuh dari DPR dan dibakukan dalam bentuk Undang-Undang, agar penerapannya bisa melampaui pergantian rezim.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulisan artikel ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Drs. Anak Agung Banju Perwita M.A., Ph.D. atas masukan terkait beberapa teori yang digunakan dalam menganalisa topik ini, terima kasih juga kami ucapkan kepada Laksamana Pertama TNI Dr. Budi Suseto, S.E., M.SI. (HAN), PH.D. atas bimbingan dalam penulisan karya ilmiah dan terima kasih juga kepada Kolonel Laut Dr. dr. Hisnindarsyah Sp.KL.Subsp.KT(K), SE., M.Kes MH, CFEM, FISQua, FRSPH atas informasinya terkait Jurnal FJST. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kepada pembaca, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Maritim yang pantas untuk berjaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhirman. (2020). STUDY EKONOMI MARITIM. In UMRAPRESS. UMRAPRESS. [https://eprints.umm.ac.id/65932/2/BAB I Rohidatul Aisy D3 Perbankan Keuangan %28006%29.pdf](https://eprints.umm.ac.id/65932/2/BAB_I_Rohidatul_Aisy_D3_Perbankan_Keuangan_%28006%29.pdf)
- Baumann, F. (2021). The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene: UNDP Human Development Report 2020. In *Environment* (Vol. 63, Issue 3). UNDP. <https://doi.org/10.1080/00139157.2021.1898908>
- Biro Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa.html>
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). *SECURITY: A New Frame Work for Analysis* (1st ed.). Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Diehl, P. F., & Goertz, G. (2010). War and peace in international rivalry. *War and Peace in International Rivalry*, 1-319. <https://doi.org/10.5860/choice.38-3560>
- Diposaptono, S. (2017). *Membangun Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Tata Ruang Laut* (M. Budiman (ed.); 3rd ed., Issue 3). Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.
- Global Fire Power. (2024). *2024 Indonesia Military Strenght*. [https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country\\_id=indonesia](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=indonesia)
- Jablonsky, D., Bartholomees, J. B., Yarger, H. R., Holcom, J. F., Jones, F. L., Cunningham, G. K., & Nation, R. C. (2008). *Theory of War and Strategy: Vol. I* (J. B. Bartholomees (ed.); 3rd ed., Issue June). US Army War College. [https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/PDIH File/e-book/Theory of War and Strategy.pdf](https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/PDIH_File/e-book/Theory_of_War_and_Strategy.pdf)
- Kantor Komunikasi Publik. (2020). *Indonesia Bisa Sejahtera dari Sektor Ekonomi Kelautan*. UNIVERSITAS PADJADJARAN. <https://www.unpad.ac.id/2020/08/indonesia-bisa-sejahtera-dari-sektor-ekonomi-kelautan/>
- Nainggolan, P. P. (2013). Kepentingan Strategis Amerika Serikat di Asia-Pasifik\*. *Politica*, 4(1), 77-103.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tentang RENAKSI KKI, 97830 (2022).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/200309/perpres-no-34-tahun-2022>

Pushidrosal. (2018). *DATA KELAUTAN YANG MENJADI RUJUKAN NASIONAL DILUNCURKAN*. Pusat Hidro Oceanografi TNI AL. [https://www.pushidrosal.id/berita/5256/Data-Kelautan-yang-Menjadi-Rujukan-Nasional--Diluncurkan/#:~:text=Luas perairan Indonesia 6.400.000](https://www.pushidrosal.id/berita/5256/Data-Kelautan-yang-Menjadi-Rujukan-Nasional--Diluncurkan/#:~:text=Luas%20perairan%20Indonesia%206.400.000).

Till, G. (2004). *SEA POWER: A GUIDE FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY*. Routledge.

Van der Kroef, J. M. (1951). The Term Indonesia: Its Origin and Usage. *Journal of the American Oriental Society*, 71(3), 166-171. <https://doi.org/10.2307/595186>

Warsito, T., & Kartikasari, W. (2007). *Diplomasi Kebudayaan Dalam Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*. Ombak.